

## Diplomasi, Aliansi dan Asimilasi; Diaspora Bugis Semenanjung Melayu Abad Ke-18 – Abad Ke-20

**Subarman**

Guru Sejarah SMKN 2 Bone, Sulawesi Selatan, Indonesia

Email: [subarmansalim@gmail.com](mailto:subarmansalim@gmail.com)

### Abstrak

Kajian ini berikhtiar menguraikan bagaimana diaspora orang-orang Bugis mencapai tahap penting dalam peta pelayaran-perdagangan di Nusantara dan Melayu pada abad ke-18 hingga abad ke-20, dengan menggunakan metode penelitian sejarah, yakni heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Hasil kajian menunjukkan dengan kekuatan bahasa, jaringan perdagangan tradisional, serta ikatan kultural, mengantarkan diaspora Bugis ke berbagai penjuru nusantara. Dengan strategi diplomasi, membangun aliansi dan mendorong asimilasi di tanah rantau, orang-orang Bugis ikut berperan penting dalam perputaran roda perdagangan di Nusantara, hingga mencapai puncak kejayaannya di semenanjung Melayu.

**Kata Kunci :** diaspora Bugis; perdagangan; semenanjung Melayu

### Abstract

*This study attempts to describe how the Bugis diaspora reached an important stage in the shipping-trade map of the Archipelago and Malays in the 18th to 20th centuries, using historical research methods, namely heuristics, criticism, interpretation, and historiography. The results of the study show that the power of language, traditional trade networks, and cultural ties have brought the Bugis diaspora to various parts of the archipelago. With a diplomatic strategy, building alliances and encouraging assimilation in overseas lands, the Bugis people played an important role in the rotation of the trade wheel in the archipelago, until it reached its peak of glory on the Malay peninsula.*

**Keywords :** Bugis diaspora; trading; Malay peninsula

### A. Pendahuluan

Ke mana pun orang-orang Bugis merantau, di situ mereka mendirikan perkampungan. Di mana pun orang-orang Bugis mendirikan kampung, di situ mereka membangun aliansi. Dan pada setiap aliansi yang terbangun, pertanda kisah diaspora pun dimulai.

Perkampungan yang dirintis oleh orang-orang Bugis di tanah rantau menegaskan bahwa betapapun jauhnya mereka berlayar, keterikatan genetis, ikatan primordial dan identitas etnis tetap dijaga. Dengan demikian, usaha apapun yang dirintis di rantau, identitas Bugis akan tetap eksis baik dalam bentuk bahasa, ritual, maupun tradisi-tradisi adat lainnya. Karena itu, meski mereka terlihat

berdiaspora secara sporadis ke berbagai pulau dalam rentang waktu ber-abad, namun pada titik tertentu, mereka terkonsolidasi dengan efektif, baik untuk urusan dagang, aktivitas sosial, maupun untuk urusan atau kepentingan politik.

Ada banyak faktor yang mendorong orang Bugis berdiaspora, di antaranya terdampak konflik, dorongan memperbaiki nasib, dan menjaga jaringan perdagangan. Terdampak konflik oleh perang mungkin menjadi faktor dominan di antara faktor pendorong lainnya. Saat perang Bone koalisi VOC Belanda melawan Makassar yang disokong oleh Wajo (sebuah kerajaan Bugis yang terletak di sisi utara kerajaan Bone) pada 1666, membawa konsekuensi bagi tersingkirnya orang-orang Bugis-Makassar yang mendorong mereka

melakukan migrasi meninggalkan tanah kelahiran. Kejatuhan Makassar itu menandai periode awal diaspora Bugis di nusantara hingga ke negeri semenanjung Melaka.

Selang tiga abad, migran sebagai penyintas konflik juga terjadi akibat perang saudara, ketika kelompok DI/TII pimpinan Kahar Muzakkar di Sulawesi memilih sikap yang bertentangan dengan Tentara Nasional Indonesia, di sepanjang tahun 1950-an hingga 1960-an. Dalam kajian Hamid (2008), menyimpulkan bahwa hidup di masa gerombolan melebihi kesengsaraan di masa pendudukan Jepang. Ingatan-ingatan masa suram 'perang gurilla' masih terekam dengan jelas oleh mereka yang hidup di jaman penuh teror itu. Suatu waktu di tahun 1960-an, Haji Beddu, warga Desa Bajoe menyaksikan orang-orang di kampung Lona (saat ini, Lona masuk dalam wilayah kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone Provinsi Sulsel) digiring lalu ditembak para gerilyawan karena dianggap berpihak kepada tentara. Tidak tahan dengan situasi mencekam, beberapa tetangga Haji Beddu memilih ikut berlayar dengan tujuan Sulawesi Tenggara demi menghindari teror para gerilyawan. Faktanya, di laut kawasan Teluk Bone tidak luput dari ancaman para gerilyawan. Haji Amile, seorang nahkoda kapal kayu dari Lonrae, juga pernah dalam situasi menegangkan ketika beberapa orang gurilla (gerilyawan) menodongnya dan memaksa kapalnya berbelok arah menuju pelabuhan Pallime.

Jika pergi meninggalkan tanah kelahiran sebagai penyintas perang lebih berkonotasi *maddakka'* (mengungsi), demi melanjutkan hidup yang lebih baik nan tentram, maka dalam situasi damai, tidak berarti dorongan migrasi pun terhenti. Kepergian dalam suasana damai, lebih sering dimaknai sebagai *sompe* (merantau) dengan tujuan mencari penghidupan yang lebih baik. Meski begitu, tidak jarang kehidupan yang dijanjikan di rantau meleset dari ekspektasi. Perantau Bugis yang menyeberang ke Sabah dan Tawau di Malaysia untuk bekerja di ladang sawit, pada pertengahan abad ke-20, tidak selalu menghadirkan cerita indah.

Sementara, Ammarell (2002) mengikuti pendapat Acciaioli (1989), bahwa migran Bugis lebih dominan didorong oleh faktor mencari

keuntungan (Bugis: *massappa dalle*) guna mewujudkan perbaikan nasib.

Among the social and cultural factors that have been attributed to Bugis migrants by both foreign writers and the Bugis themselves, the idea of good fortune provides a highly productive frame for understanding the meaning of both their presence in East Timor, West Timor, and Ambon, and their forced departure. (Ammarell, 2002: 64)

Di seberang pulau, di Sulawesi Tenggara, sisi Timur Teluk Bone, orang-orang Bugis telah lama mendirikan perkampungan di Poleang, Muleno, Bambaia, Kolaka hingga Kendari. Bertani dan membuka lahan perkebunan untuk ditanami coklat atau kelapa adalah kegiatan alternatif (atau pengisi kekosongan menunggu pergantian musim) selain melaut dan berniaga. Beberapa tokoh agama dari Makassar, Luwu dan Bone didatangkan untuk misi islamisasi dengan mengajarkan kepandaian mengaji kepada penduduk lokal di daerah Kolaka, Pomala dan sekitarnya. (Melamba, 2012: 164)

Wilayah yang terletak di sisi Timur Teluk Bone ini sebenarnya telah memiliki relasi tradisional sejak lama dengan Bugis, khususnya kerajaan Bone. Ketika Arung Palakka berkunjung ke Buton dalam upayanya menemukan dan menguatkan aliansi dalam rangka perang menghadapi dominasi Gowa, di sekitar abad ke-17. Arung Palakka mendapatkan dukungan dan perlindungan dari kerajaan Buton, sebagaimana jalinan hubungan kedua kerajaan yang bertekad untuk saling mendukung.

Secara geografis, Sulawesi Tenggara satu daratan dengan Sulawesi Selatan. Meskipun demikian, pada periode kolonial maupun era kerajaan, karena kondisi alam dan akses darat masih sangat sulit dijangkau, sehingga jalur laut tetap menjadi jalur penghubung utama. Selain Kolaka yang ada di sisi Timur Teluk Bone, di sisi lain Tenggara, jaringan perdagangan juga telah terhubung melalui Teluk Kendari. Jalur antara Kendari dan Baubau terhubung ke dalam lalu lintas jaringan perdagangan internasional ke pusat produksi rempah-rempah di kepulauan Maluku juga ke pusat perkapalan dan pengangkutan di Makassar, Surabaya hingga ke Singapura, banyak diperankan oleh pedagang Bugis. Kehadiran pedagang Bugis terutama

untuk pemasok komoditi penting seperti lola, teripang dan mutiara. (Rabani, 2020: 40)

Persebaran Bugis di nusantara setidaknya sudah berlangsung sekurang-kurangnya sejak abad ke-16, yang ditandai dengan hadirnya pemukiman-pemukiman yang dibangunnya di beberapa wilayah di nusantara. Ketika Portugis singgah di Teluk Kendari pada abad ke-16, dalam laporannya menyebutkan pemukiman orang-orang lokal, Bajo dan Bugis. (Kaunang, dkk., 2016: 264) Diaspora Bugis di nusantara merupakan yang paling makmur, yang menurut Lombard, ditandai dengan kehadiran perahu-perahu layar pinisi berpuluh hingga beratus-ratus unit di semua pelabuhan besar, seperti di Jakarta, Surabaya, Banjarmasin dan Palembang. Keberadaannya menjadi ciri tersendiri yang acap ditemui di wilayah-wilayah pesisir. (Lombard, 2005: 89)

Orang-orang Bugis telah ikut berperan bagi terbentuknya jaringan perdagangan baik dalam konteks lokal, antar pulau juga dalam jaringan Asia Tenggara, hingga ke taraf internasional. Bahkan, kedatangan Bugis ke negeri Melayu bukan sekadar berdagang. Sutherland menyebut abad ke-18 sebagai 'periode Bugis' untuk menggambarkan bagaimana sepak terjang orang-orang Bugis dalam mendominasi perdagangan dan turut andil dalam percaturan politik di kerajaan Johor kala itu. (Sutherland, 2021:213)

Keunggulan Bugis mendapat perhatian saat muncul sebagai penengah yang dibutuhkan dalam konflik internal yang melanda kesultanan Johor sekitar abad ke-18. Dalam hikayat Melayu tercatat suatu ketika kesultanan Johor dilanda krisis internal, yang melibatkan orang-orang penting dan bangsawan berpengaruh. Krisis lalu mengerucut pada goyahnya legitimasi sultan oleh manuver raja kecil. Jelas krisis ini tidak hanya terkait perebutan kekuasaan. Stabilitas sosial menjadi pertimbangan utama demi menjaga Johor tetap tercitra sebagai kawasan yang aman dan kondusif bagi keberlangsungan perniagaan. kesultanan di ambang perang saudara, sebelum Daeng Marewa seorang tokoh utama Bugis, tampil sebagai penengah dan memecah kebuntuan diplomasi.

Bak seorang pahlawan, Daeng Marewa berhasil tampil sebagai penyelamat kesultanan Johor dari ekspansi Siak yang dipimpin oleh Raja Kecil putera Raja Pagaruyung. Atas jasa

tersebut, Daeng Marewa kemudian diberi penghargaan dengan kedudukan sebagai Raja Muda Johor yang bergelar Yang Dipertuan Muda. Posisi prestisius itu adalah gelar dan jabatan pertama bagi 'orang luar', setingkat di bawah Sultan Johor, menggambarkan bagaimana keberhasilan Bugis menancapkan dominasi dan kekuasaannya di tanah Melayu. Kedudukan yang selanjutnya memberikan kekuasaan untuk Bugis menguatkan pengaruhnya dalam bidang perdagangan juga aliansi yang kuat. (Parani, 2015: 60-61)

Berkat upayanya sebagai penengah mencegah konflik membesar, orang-orang Bugis diibaratkan sebagai dewa penolong. Bahkan, Sutherland menulis 'periode Bugis' untuk menggambarkan peran dan keberhasilan Bugis dalam meluaskan pengaruh dan menanamkan dominasinya di semenanjung Melayu. (Sutherland, 2021: 213)

Kesohoran masyarakat Bugis Makassar dapat dibuktikan dalam kisah-kisah kepahlawanan kerajaan Johor, serta kerajaan melayu lainnya. Bugis Makassar tidak hanya dikenal sebagai warga pelaut dan pedagang yang ulung, tetapi juga keberhasilannya dalam menarik hati penguasa daerah setempat untuk senantiasa bekerjasama dalam mempertahankan kedudukan kerajaan. Para perantau Bugis Makassar ibarat dewa penolong bagi kerajaan yang sudah hampir runtuh, mereka menjelma menjadi kesatria gagah berani, yang selalu memenangkan peperangan (Gustina, 2020: 2)

Dewa penolong lalu diberi penghargaan sebagai penguasa kedua atau Raja Muda dengan gelar Yang Dipertuan Muda yang selanjutnya mengubah perjalanan sejarah Bugis di semenanjung Melayu. Menduduki posisi kedua di puncak kekuasaan kesultanan Johor menjadi bukti sah bagaimana orang-orang Bugis tidak hanya dalam kefasihannya membaca dinamika politik, tapi sekaligus mampu mengaplikasikan kemampuan berdiplomasi yang sangat penting dalam urusan politik. Mendapatkan gelar Yang Dipertuan Muda menasbihkan orang-orang Bugis sebagai bukan lagi pendatang, namun menjadi bagian integral dari pemerintahan.

Bagaimana orang-orang Bugis memperoleh kedudukan prestisius dan bahkan paling berpengaruh di Johor pada masa itu?

Sementara, abad ke-18 adalah abad ekspansi atau spesifik bermakna kolonisasi bagi Belanda, Portugis dan Spanyol. Kala itu, perdagangan tidak selalu bermakna pertukaran barang dengan barang atau barang dengan koin berharga. Perdagangan -termasuk aktivitas bajak laut-pun lebih sering bermakna penguatan posisi politik. Persaingan dengan Belanda dalam upaya menguasai perdagangan Timah di semenanjung Melayu, terutama di muara-muara sungai di Johor, menasbihkan Bugis sebagai pemenang, bukan sebagai pelaut unggul, tapi sebagai pedagang yang andal dan politisi yang kuat. Karenanya, mereka mendapatkan perhatian dari pemerintah kerajaan Johor. Ketika dihadapkan pada pilihan 'berteman dengan orang luar' daripada menjadikannya sebagai musuh yang mengancam, terang Sultan Johor memilih orang Bugis. Bugis terbukti telah banyak mendatangkan keuntungan secara politik dengan dukungan orang-orang Bugis baik di darat maupun 'di laut' yang terkonsolidasi dengan baik, dibanding Belanda yang lebih dikenal dengan politik *divide et impera*.

Pemahaman politik yang baik mungkin menggambarkan bagaimana orang-orang Bugis mengetahui titik krusial dan kelompok mana saja yang memiliki kekuatan dan pengaruh di tanah Melayu. Selain itu, orientasi jangka panjang menunjukkan dengan jelas bahwa mereka bukan politisi amatiran. Mereka bukan kelompok oportunistis yang segera lupa diri ketika peluang merebut kuasa terbuka lebar. Hal ini selalu diingatkan oleh Daeng Marewa kepada orang-orangnya kala itu: "belum saatnya orang-orang Bugis berkuasa di Johor." Sikap itulah yang tampaknya justru memberinya rasa hormat dan membuat mereka tidak mudah di singkirkan oleh orang-orang istana.

Namun, orang-orang Bugis tidak bekerja sendiri. Apa yang diperankan di dalam konflik internal istana dan posisi bargaining politik yang menghadirkan equilibrium, adalah kekuatan mereka menguasai dan mengendalikan laut. Di perairan Malaka, hanya kelompok Bugis yang mampu 'menaklukkan' para bajak laut yang sangat dihindari oleh para pedagang. Bahkan, pada situasi tertentu, orang-orang Bugis memerankan bajak laut demi bertahan hidup atau demi mendapatkan kembali posisi politik yang mulai tergerus. Haji Ali yang merupakan salah satu penerus dari Daeng

Menambung, pernah bergabung dengan kelompok bajak laut ketika tersingkir dari istana Johor akibat perseteruannya dengan Raja Haji. (Parani, 2015)

Berdasarkan uraian di atas, maka kajian ini mengajukan dua pertanyaan, yakni bagaimana orang-orang Bugis mencapai tahap penting dalam peta pelayara-perdagangan nusantara hingga ke semenanjung Melayu sejak abad ke-18 hingga abad ke-20? Bagaimana strategi dan pola apa yang dikembangkan, serta kekuatan-kekuatan pendukung apa yang telah memicu tumbuhnya konsentrasi diaspora Bugis di semenanjung Melayu?

## B. Metode Penelitian

Penelitian deksriptif ini menggunakan sumber-sumber tertulis sebagai sumber rujukan, baik berupa hasil penelitian yang dipublikasikan di jurnal, buku, atau artikel dalam bunga rampai, dan artikel dalam website yang terkait dengan topik dan isu turunan dari topik utama diaspora Bugis. Sumber lisan juga diperoleh melalui wawancara khususnya untuk aktivitas dagang dan migrasi orang-orang Bugis era perang gerilyawan DI/TII di Sulawesi Selatan. Kajian ini menetapkan rentang waktu abad ke-18 hingga abad ke-20 sebagai periode panjang sejarah persebaran Bugis di Nusantara maupun kepulauan-kepulauan yang ada di semenanjung Melayu yang dalam perspektif pra-kemerdekaan adalah bagian penting dan puncak kejayaan diaspora Bugis.

Penelitian ini menggunakan metodologi sejarah meliputi empat tahap, yakni *pertama*, heuristic yakni mengumpulkan data baik primer maupun sekunder; *kedua*, kritik dengan cara membandingkan beberapa sumber yang mengangkat topik serupa, juga menguji aspek diakronis, yakni kesesuaian antara paparan data dengan kronologis dan tentu saja sebuah sumber harus memenuhi syarat-syarat logis ; *ketiga*, interpretasi yakni memberi penafsiran baik berupa argumentasi naratif maupun argumentasi konklusif dari sumber-sumber yang ada; dan *keempat*, historiografi, yakni tahapan penulisan.

## C. Tinjauan Penelitian

Kajian diaspora Bugis di nusantara maupun di kepulauan Melayu telah banyak dikaji oleh para peneliti. Sebuah buku berisi

kumpulan artikel yang mengulas diaspora Bugis dalam ragam topik dapat ditemukan dalam buku yang berjudul “Diaspora Bugis di Alam Melayu Nusantara” (Bakti, dkk., 2010). Buku ini dibagi menjadi dua bagian, yakni Bugis di Indonesia Barat dan Bugis di Sulawesi dan Kawasan Indonesia Timur. Dalam bunga rampai ini pula, Christian Pelras (hal. 99-111) menguraikan bahwa hubungan Bugis dengan Melayu telah terjadi sebelum era kedatangan Islam (sebelum abad ke-17). Pelras mengajukan bukti berupa perbandingan budaya material dan kosakata yang ditemukan di bidang pertanian, arsitektur kayu, tenun, aktivitas dan material memasak dan teknologi besi. Sedangkan pengaruh lainnya datang setelah periode Islamisasi ditemukan pada gaya berpakaian, ornament, senjata, dan seni sastra. (Bakti, 2010: 101)

Artikel lainnya dalam buku itu yang menarik dan relevan dengan tema kajian ini adalah “Peranan Bugis Pendatang dalam Proses Islamisasi Bagian Timur Indonesia: Kasus Konteks Sejarah Ambon,” ditulis oleh Badrus Sholeh (hal.179-190). Sholeh membagi dua periode sejarah pendatang Bugis di Ambon, yakni sebelum dan setelah konflik. Ia menyimpulkan, kedatangan Bugis di Ambon selain berkontribusi bagi penyebaran Islam, juga dalam perkembangan perdagangan. Meskipun telah hidup di masa dan menjadi bagian dari periode konflik, orang-orang Bugis di Ambon juga mengupayakan asimilasi dan turut aktif dalam proses terwujudnya perdamaian di Ambon.

Persebaran Bugis di Sumatera salah satunya ditandai dengan perkembangan kopra pada sekitar awal abad ke-20 (Sani, 2020). Perkembangan perdagangan kopra di Sumatera menurut penelitian Sani tidak bisa dilepaskan dari peran dan jaringan rantai perdagangan yang dirintis dan dibangun oleh orang-orang Bugis. Orang-orang Bugis dalam menjaga kelangsungan produksi komoditas kelapa membuka lahan dan menanam kelapa di Sumatera, seperti yang mereka lakukan di Sulawesi Tenggara (Asba, 2007).

Selain berdagang, diaspora Bugis juga dikuatkan oleh tradisi dan modal kultural yang tetap dijalankan di negeri rantau. Hal itu dapat ditemui pada komonitas Bugis yang ada di Riau dan Jambi. Dari penelitian Jamaluddin, (Tradisi dan Modal Kultural Etnis Bugis di Riau dan

Jambi, 2018) dikemukakan bahwa perantau Bugis di Riau dan Jambi mempertahankan tradisi Islam yang diwarisi dari tanah leluhur, di antaranya *mabbarazanji, mammuđu, mangaji tudang, mappanre temme, mammiraje, mattampung, mappenre tojang, menre haji dan cemme saparang*. Tradisi tersebut tidak hanya bermakna ejawantah nilai-nilai keislaman, namun juga menjadi ekspresi kultural yang penting dalam menjaga eksistensi dan identitas kebangsaan.

Kedatangan orang-orang Bugis di Bontang Kuala, ditulis oleh Purba, dkk. (2017). Kehadiran Bugis di Kalimantan dapat ditelusuri melalui artefak batu nisan yang menggunakan huruf Bugis Kuno bertuliskan tahun 1758. Diperkirakan mereka tiba di sana dengan menggunakan perahu pinisi. Kajian Purba, mengungkapkan bahwa orang-orang Bugis memiliki ciri khas baik dari bahasa maupun praktek ritual yang dikembangkan secara turun temurun. Ciri khas diaspora Bugis di Bontang Kuala cenderung menghindari asimilasi dengan orang di luar kelompok, -berbeda dengan apa yang terjadi di semenanjung Melayu pada abad ke-18, meskipun pada kedua wilayah itu terjadi mobilitas silang oleh orang-orang Bugis. Selama beberapa dekade kelompok Bugis adalah kelompok dominan, yang menurut Purba (2017:3-4) mereka kawin mawin sesama mereka dan mengembangkan budaya dari tanah leluhur.

Orang-orang Bugis mulai mendiami pesisir Kalimantan, membangun koloni-koloni di dekat Samarinda dan Pasir; di tenggara Kalimantan, Pontianak, Semenanjung Melayu, khususnya di barat daya Johor, dan di wilayah lainnya di Nusantara. Di Kalimantan Selatan, orang-orang suku Bugis berhasil membangun pemerintahan Bugis atau to-Ugi’ Pagatan tahun 1735. Pemukiman yang dibangun orang-orang Bugis tahun 1735 hingga tahun 1800 menjadi embrio dari perkembangan jaringan diaspora dan perdagangan perahu layar Bugis antar pulau pada tahun 1850-an. (Purba, 2017:14-15)

Di Bontang, orang-orang Bugis memulai karir sebagai pedagang keliling yang gigih. Mereka menjual kelapa-kopra ke Surabaya, bersama teripang, damar, rotan, mutiara, kayu ulin, dan kirma. Dari Surabaya mereka

membawa pulang guci dan lemari. Dalam perjalanan mereka singgah ke Sulawesi dan menjual barang dagangan mereka yang diperoleh dari Surabaya. (Purba, 2017: 45)

Kedatangan Bugis(-Makassar) di Kalimantan Tengah juga mendapat perhatian Suryanti, dkk (2021). Temuan Suryanti mengenai keberadaan Bugis-Makassar di Kalimantan Tengah masih terhubung dengan tanah kelahiran. Dalam aktivitas harian dan ritual, mereka masih menyelenggarakan praktek adat serta tradisi leluhur. Dengan menggunakan pendekatan studi naratif, Suryanti melihat orang-orang Bugis-Makassar sebagai pendatang mampu menjalin hubungan harmonis dengan orang-orang Dayak yang merupakan penduduk lokal Kalimantan Tengah.

Karya lainnya yang membahas diaspora Bugis di Surabaya adalah Sarkawi B Husain dengan judul “Selama Laut Masih Berombak, Pasir di Pantai Tak Akan Tenang”, *Diaspora Orang-orang Bugis-Makassar di Surabaya Abad XV-XX* (2011). Husain mengemukakan tiga faktor yang mendorong migrasi Bugis-Makassar ke Surabaya, di antaranya adalah faktor keamanan, faktor ekonomi, dan pendidikan. Faktor keamanan adalah dampak dari perjanjian Bongaya yang menempatkan orang Makassar dan Bugis (Wajo) sebagai pihak yang kalah. Faktor keamanan lainnya adalah masa kekacauan oleh teror gerilyawan pada tahun 1950-an. Faktor ekonomi, mendorong aktivitas perdagangan makin intens dan berkembang dalam jaringan yang luas dari kepulauan Maluku, hingga ke barat meliputi Pelabuhan Jawa Utara, Banten, Riau hingga ke Selat Malaka. Faktor ketiga yang mendorong Bugis-Makassar ke Surabaya yakni keinginan mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi termasuk misi pengabdian dalam institusi kemiliteran, khususnya angkatan laut. (Husein, 2011)

Orang-orang Bugis bersama Mandar dan Makassar juga berdiaspora ke pulau Bali. Uraian sejarah dan perkembangan diaspora Bugis di Bali dapat disimak dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh Khusyairi, dkk dengan judul “Berlayar ke Pulau Dewata; Diaspora Orang-orang Bugis-Makassar dan Mandar di Pualu Bali,” yang diterbitkan dalam bentuk buku pada tahun 2017. Dijelaskan bahwa, hikayat asal usul nama Buleleng dan

Singaraja, yang menandai kebesaran kerajaan yang oleh orang-orang Bali dikaitkan dengan kedatangan pertama kali orang Bugis di Bali saat sebuah perahu pinisi terdampar di pantai Buleleng. Khusyairi (2017) mengemukakan bahwa, salah satu kemampuan yang dimiliki orang-orang Bugis untuk bertahan di negeri rantau adalah adaptasi dan penghormatan mereka terhadap tradisi lokal.

Diaspora Bugis dalam tinjauan jaringan perdagangan serta tumbuhnya kantong-kantong bandar niaga yang mendorong berkembangnya tata ekonomi nusantara telah menghadirkan kekaguman. Peranan Bugis dalam sejarah perekonomian khususnya dalam aktivitas pelayaran-perdagangan jelas tidak bisa diabaikan. Namun, diaspora memiliki sisi gelap yang perlu dikaji agar tidak menimbulkan distorsi dan gesekan konflik dengan kelompok ‘tuan rumah’. Faktanya, kita sering disuguhi peristiwa konflik antar kelompok yang melibatkan pendatang dengan warga lokal. Apapun motifnya, konflik antar kelompok etnis tentu akan menjadi alarm bagi proses tumbuhnya Indonesia sebagai bangsa yang majemuk.

Terkait sisi gelap atau potensi konflik terkait adaptasi migran Bugis berhadapan dengan penduduk lokal menjadi perhatian dalam kajian yang diangkat oleh Ammarell (2002), dengan topik, “Bugis Migration and Modes of Adaptation to Local Situation.” Ammarell menyusun pernyataan ironi, bahwa migran Bugis telah membantu proses integrasi nasional sekaligus memicu disintegrasi, -dulu dan sekarang. Ia menyebut kasus Timor Timur, Ambon, Sulawesi Tengah, dan Papua Barat - merujuk kaitan riset yang dilakukan oleh Kopytoff (1987) dan Scott (1998) dilanda krisis antar kelompok pendatang dengan warga lokal. Ammarell menuding, bahwa seringkali kelompok pendatang Bugis membawa budaya politik dan ekonomi serta model tatanan sosial yang dipaksakan kepada penduduk asli atau warga lokal (Ammarell, 2002).

Kritik Ammarell terhadap diaspora Bugis seakan menginterupsi lembaran sejarah jaringan perdagangan nusantara. Sisi lain diaspora Bugis ini tentu perlu dipertimbangkan, mengingat isu disintegrasi dan konflik antar kelompok belum bisa benar-benar selesai di Indonesia.

Penelitian-penelitian yang disebutkan di atas, menguraikan bagaimana ciri persebaran yang dilakukan oleh orang-orang Bugis menghadirkan tipikal sesuai karakteristik wilayah juga banyak ditentukan oleh dinamika yang terjadi pada daerah tujuan. Atas dasar itu, penelitian ini dihadirkan untuk membuat pemetaan dan menghadirkan konstruksi pola persebaran Bugis khususnya di semenanjung Melayu yang diidentifikasi sesuai dengan faktor-faktor pendorong juga capaian keberhasilan yang ditorehkannya.

#### **D. Hasil dan Pembahasan**

##### **Bahasa (Bugis) adalah kekuatan**

Salah satu kekuatan yang dimiliki suku Bugis dalam interaksi dan mengembangkan budayanya adalah sistem bahasa. Menurut Mattulada (1985), bahasa Bugis memiliki kekuatan lengkap karena didukung dengan simbol atau lambang aksara, yang mendukung tradisi tutur dan tradisi tulis. Penggunaan bahasa pada penyelenggaraan ritual maupun aktivitas harian, menjadi instrument penting bagi orang-orang Bugis tidak hanya dalam upaya menjaga eksistensi bahasa, juga pada aspek peneguhan ikatan komunal.

Bahasa Bugis digunakan untuk semua kegiatan budaya, termasuk di negeri rantau. Pengaplikasian bahasa Bugis juga berlaku di dalam kegiatan penyebaran agama, perniagaan, pertanian dan seni-sastra. Baik berupa tanda bunyi atau aksara lontara, maupun hasil kesusastraan Bugis erat hubungannya dengan kehidupan yang tersimpul dalam *pangadereng*.<sup>1</sup> (Mattulada, 1985 dalam Riadi, 2019: 35)

Dalam hikayat La Galigo, sebuah epos sastra terpenting, diketahui bahwa orang Bugis memiliki visi dan orientasi laut. Menurut Lombard, wiracarita La Galigo dengan tokoh utama Sawerigading yang sebagai pelaut yang luar biasa, menggambarkan bagaimana pemahaman laut orang-orang Bugis tergambarkan dalam karya sastra tersebut. La Galigo adalah warisan yang menjadi petunjuk penting bagaimana perspektif laut orang-orang Bugis. Kekaguman Lombard, juga diakuinya karena hikayat itu lebih panjang dari epos Odiseus. (Lombard, 2005: 92)

---

<sup>1</sup> Pangadereng dalam makna Bugis adalah peradaban. Dalam keseharian ia adalah norma yang jadi acuan orang-orang Bugis dalam berinteraksi

Di laut dan kegiatan perniagaan, ditemukan sumber-sumber luar yang membahas tentang aktivitas pedagang-pedagang Bugis yang terekam dengan salah satu ciri khasnya yang mencolok adalah penggunaan bahasa. Pires mungkin adalah orang Eropa pertama yang melihat kekuatan Bahasa Bugis itu. Ia menggambarkan sosok yang bertubuh tegap dan gagah laksana prajurit dan menuturkan bahasa sendiri. (Meilink-Roelofs, 2016:124)

P.J. Kooreman, seorang pejabat birokrasi Hindia Belanda yang pernah ditugaskan di Sulawesi Selatan, menyimpulkan bahwa bahasa menjadi aspek penting yang membedakan antara Bugis dengan Makassar. Fakta bahwa keduanya berada dalam kawasan geografi yang sama, tampilan fisik, menunjukkan perawakan yang nyaris tidak bisa dibedakan, akan tetapi, setiap kali terjadi interaksi baik terutama dalam situasi formal, masing-masing tetap menggunakan bahasa sendiri, akan tetapi bisa saling memahami. Hal ini, menurut Kooreman, memerlukan perhatian, terutama bagi peneliti bahasa. Ia melihat kecenderungan masyarakat Bugis-Makassar yang tidak memiliki kepekaan yang tinggi dalam meniru bahasa atau menyerapnya. Bahkan terhadap kebiasaan atau adat istiadat dari suku-suku bangsa yang bersentuhan dengan mereka. Dengan orang Melayu yang melakukan kontak dagang dengannya, lebih sering menggunakan bahasa sendiri sebagai bahasa niaga dibanding menggunakan bahasa setempat. (Kooreman, 2019: 74-75)

Terkait pengaruh dan kekuatan bahasa Bugis dalam mengarungi laut pun saat berniaga dan berdiaspora, juga disebut oleh Andaya muncul dan diserap ke dalam gelar dan istilah kebangsawanan orang-orang Melayu, misalnya pada gelar 'datu' juga untuk penyebutan 'datu sullewatang'. (Andaya, 2019: 219).

Sementara itu, meski berjarak lebih seabad, pedagang-pedagang Bugis abad ke-20 ternyata masih mampu menjaga kekuatan bahasanya. Mereka mempertahankan penggunaan kata metaforis untuk menandai sebuah tempat atau demi menyembunyikan makna sebenarnya untuk sebuah aktivitas atau ketika menyaksikan sebuah kejadian. Misalnya, untuk menggambarkan badai atau ombak besar,

mereka menyebutnya dengan istilah ‘kala-kala’. Sebaliknya, untuk menggambarkan cuaca yang bersahabat dengan angin yang sepoi-sepoi dan laut yang tenang, para pelaut Bugis menyebutnya dengan istilah “wettu limpo”. Begitu pula ketika dalam perjalanan dan dihadapkan pada situasi harus berlawanan dengan arus angin, pelaut Bugis punya strategi berlayar yang mereka sebut dengan istilah ‘maggaragaji’. ‘Maggaragaji’ secara harfiah maknanya adalah memotong dengan cara melakukan gerakan naik-turun atau maju-mundur. Teknik berlayar ‘maggaragaji’ biasanya dilakukan di musim Timur.<sup>2</sup>

Makna layar yang dalam Bahasa Bugis disebut ‘sompe’, yang juga bermakna merantau, mengindikasikan bahwa kegiatan merantau selalu dikaitkan dengan kepergian ke negeri jauh mengarungi laut dengan menggunakan perahu layar. Dalam perjalanan awak kapal, juga dikenal istilah ‘mangapping’, sebuah fasilitas untuk awak yang memungkinkan mereka ikut berdagang, meskipun dalam jumlah yang relatif kecil, sekadar mencari tambahan penghasilan.<sup>3</sup>

Haji Beddu, mengingat jelas ketika ia bersama rombongan awak kapal lainnya berjalan-jalan di kota Gresik. Sebagai pelaut, mereka selalu punya kisah dan punya cukup waktu untuk menemui gadis-gadis di kota tempat mereka berlabuh. Gadis-gadis yang menurutnya suka tertawa itu, mereka panggil dengan sebutan “lallampe gemme” (Bugis: orang dengan rambut panjang). (Wawancara dengan Haji Beddu, 28 Januari 2023)

Selama para pelaut mengarungi lautan dan berinteraksi dengan orang-orang dari pulau berbeda, tidak pernah mengalami gangguan atau kendala berarti terkait identitas, baik sebagai orang Bugis maupun sebagai penganut agama Islam. Namun, bagi Haji Madong, Haji Amile, juga Haji Beddu, identitas Bugis-nya diuntungkan dengan jaringan yang sudah terbentuk serta keluwesan bahasa yang digunakannya. Hal ini menunjukkan bahwa, aktivitas pelayaran dan jaringan perdagangan yang terbentuk bisa membendung sentiment rasialis secara efektif. Jika di kapal semua orang diperlakukan sama, di kota-kota pelabuhan pun nuansa inklusif begitu kental dan sikap toleransi relatif dijunjung tinggi. Dalam konteks ini,

tentu saja akar-akar integrasi nasional dapat ditelusuri dengan menemukan pola komunikasi lintas budaya yang terjadi di dermaga-dermaga yang menyebar ke seluruh penjuru negeri.

### Jaringan lama dan ritual adat

Walau jauh jarak dari tanah asal, orang-orang Bugis senantiasa terhubung dengan kampung kelahiran dan identitas kulturalnya. Mereka mengupayakan kehidupan terselenggara laiknya apa yang mereka bisa lakukan di Sulawesi, sekurangnya lewat penggunaan bahasa dan terutama ritual adat. Masih ditemukan setandan pisang dan *sawa*<sup>4</sup> digantung di tiang tengah rumah panggung atau disudut rumah yang baru saja selesai dibangun. Pisang dan *sawa* itu merepresentasikan doa dan harapan keberkahan pada rumah baru yang akan mereka tempati. Hajatan pindah rumah, peresmian kapal baru, adalah ritual syukuran, biasanya diisi dengan ritual ‘mabbaca-baca’<sup>5</sup>, yang juga dilakukan saat musim panen tiba. ‘Mabbaca-baca juga tetap diselenggarakan pada momen-momen perayaan hari besar, juga pada saat hajatan keluarga, dalam rangkaian pernikahan, sunatan, penamatan sekolah maupun penamatan mengaji. Mereka juga tetap mengusahakan penganan khas yang tidak boleh terlupa saat ritual *mabbaca-baca* misalnya *onde-onde*, *wessang lawo*, *sokko*, *palopo*, *beppa leyya*, dan *barongko*.

Ritual adat yang masih dipraktikkan oleh orang-orang Bugis di negeri rantau menjadi penguat ikatan kultural, yang di sisi lain, turut menjaga dan melanjutkan jaringan-jaringan kekerabatan yang sudah terbangun sebelumnya. Dalam perkembangannya, definisi kampung dan rantau bagi orang Bugis menjadi kian samar. Beberapa yang lain memilih keduanya: negeri rantau dan negeri asal sama sebagai kampung. Fenomena ini dapat ditemukan di Sulawesi Tenggara, khususnya di Kolaka, Poleang, Boepinang dan Bambaëa. Orang-orang Bugis di daerah itu, telah lama menganggap wilayah tempat mereka menetap dan mencari nafkah telah menjadi kampung sendiri. “Saya sudah lama menjadi orang Poleang, di sini sudah menjadi kampung saya,” kata Takiyuddin. Lebih sedekade lalu, ia meninggalkan Bone, bekerja sebagai guru di

<sup>2</sup> Wawancara dengan Sahaka, 8 Februari 2023

<sup>3</sup> Wawancara dengan Sahaka dan Haji Madong, 9 Februari 2023

<sup>4</sup> Penganan terbuat dari beras ketan

<sup>5</sup> Mabbaca-baca adalah ritual berupa doa syukuran

salah satu sekolah di Poleang. Ia menikah dengan seorang perempuan anak juragan kapal yang sebenarnya memiliki garis keturunan Bugis-Bone. Sehari-hari mereka dengan tetangga menggunakan bahasa Bugis.<sup>6</sup>

Pengakuan dua kampung bagi perantau boleh jadi adalah pilihan realistis yang tampaknya berseberangan dengan petuah lama “hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri, tetap lebih baik negeri sendiri.” Hujan emas mungkin bermakna keluarga dan sejarah. Akan tetapi, sejarah keluarga harus terus berlanjut ke generasi berikut. Dan memilih kampung tidak harus dikaitkan dengan loyalitas. Meski itu harus menciptakan dilemma. Sebagaimana temuan Purba (2017) mengenai sikap dikotomis orang-orang Bugis-Bone di Bontang. Bagi sebagian perantau, mereka kerap ditimpa dilemma antara loyalitas kepada negeri rantau atau kepada tanah leluhur yang kini jauh. Seorang tokoh dari Bontang, mengatakan “Ikatan dengan tanah leluhur tidak kuat. Saya sudah dua kali ke sana hanya ingin tahu bagaimana Bone itu. Tapi saya tidak merasa orang Bone. Kebijakan tanah leluhur menyatakan, “jangan lagi cari keluarga di Bone.” (Purba, 2017:69-70)

Saat kapal berlabuh di dermaga Kolaka atau Boepinang, sawi dan ABK (anak buah kapal) yang sebagian merupakan penduduk lokal, mereka menyempatkan untuk pulang ke rumah, membawa oleh-oleh untuk keluarga. Sawi dan ABK juga menggunakan kesempatan untuk bergantian shift dengan ABK lainnya. Pergantian shift ini untuk memastikan agar kapal tidak ditinggalkan dalam kondisi kosong. Para Sawi berasal dari Selantigoro, sebuah kawasan yang dialiri sungai tenang yang bermuara di Teluk Paria. Beberapa kapal Bugis menyukai melempar sauh di Selantigoro karena terlindung dari angin dan ombak besar, tempat yang tepat untuk menepi sambil memeriksa kondisi kapal.<sup>7</sup> Jaringan tradisional yang diperankan ABK dan sawi demikian ikut mendukung terjaganya mata rantai pelayaran-perdagangan di Teluk Bone.

Ikatan kultural demikian memberi dukungan kepada para pedagang lokal yang memanfaatkan jaringan perdagangan tradisional yang menyebar di nusantara. Pedagang-pedagang Bugis yang berlabuh ke

pelabuhan di Tenggara, Maluku, Timor, Jawa, Kalimantan hingga ke kepulauan Riau, dan semenanjung Malaka tidak pernah terkendala dengan penggunaan bahasa untuk berkomunikasi. Jika tidak paham bahasa Bugis, kontak dengan pedagang adalah jaringan lama yang sudah terbentuk oleh jaringan pendahulu sehingga memungkinkan mereka untuk menaruh kepercayaan dan saling memahami. Haji Madong, Haji Beddu dan Haji Amile mengungkapkan kalau bahasa Bugis menjadi semacam bahasa umum bagi pedagang-pelayar. Walakin, pada kasus-kasus khusus, bahasa Indonesia turut membantu proses komunikasi dengan jaringan para pedagang atau dengan mitra baru.

Pedagang di Sulawesi Tenggara, yang dominan diperankan oleh orang Bugis, umumnya mencari komoditi di pelosok, yang selanjutnya dipasok untuk memenuhi permintaan jaringan pasar lintas pulau. Pola dagang antar pulau merupakan sebuah peningkatan, yang sebelumnya hanya dilakukan terbatas di dalam pulau atau pasar tradisional. Perkembangan ini adalah dampak dari terbukanya dermaga di kawasan barat Teluk Bone di antaranya yang penting adalah Bajoe, Pallime, Kajuara, Palopo, Balangnipa dan Malili. Begitupula di kawasan timur teluk, aktivitas dagang berkembang di wilayah Kendari, Palannga, Tinannggea, dan Poleang. Komoditi dari wilayah tersebut, umumnya diantar langsung ke Surabaya atau dikapalkan ke Pelabuhan Makassar. (Nur, TT: 9)

Yang menarik dalam tata perniagaan ini adalah komoditi khas bukan satu-satunya yang menguatkan posisi pedagang Bugis maupun pedagang nusantara umumnya. Keterlibatan pedagang nusantara dalam perdagangan Asia Tenggara maupun jaringan pasar internasional, bukan ditentukan oleh ketersediaan produk hasil tanaman khas tropis seperti aneka rempah, yang menjadi incaran orang Eropa maupun pedagang dari Timur Tengah. Kenyataannya, pedagang nusantara dan khususnya orang-orang Bugis mampu menyediakan komoditi hasil produksi olahan tangan yang laku di pasar, seperti perhiasan emas dan perak, termasuk di antaranya aneka produk logam dan kain tradisional. Komoditi tekstil bahkan menjadi salah satu yang terbaik dan banyak dicari dalam tata niaga pada era pra-kolonial. Orang-orang

<sup>6</sup> Wawancara dengan Takiyuddin, tanggal 25 Januari 2023

<sup>7</sup> Wawancara Sahaka, 8 Februari 2023

Arab bersama Bugis adalah penyuplai terbesar kain sutera yang indah dan mewah, baik dalam bentuk sarung juga selendang. (Burhanuddin, 2003: 136-137)

Ciri jaringan lama yang masih dijumpai hingga awal abad ke-20 adalah barter. Sistem barter dengan cara barang ditukar dengan barang, mungkin terdengar kuno. Tetapi, sebenarnya konsep itu tidak sepenuhnya ditinggalkan. Beberapa komoditi bahkan lebih mudah diperoleh jika mendapatkan alat tukar yang cocok. Di sisi lain, pedagang-pedagang Bugis punya alat tukar yang memiliki *marketable value* yang kuat, yaitu beras. Beras mungkin bisa dijadikan sebagai alat tukar untuk komoditi. Hal ini pula yang mendorong para ABK melakukan aktivitas ‘mangapping’<sup>8</sup> yakni ikut menjual beras di setiap dermaga yang mereka singgahi.

Sistem barter, dan ‘mangapping’ seperti halnya titip barang adalah mode tradisional yang berkembang dalam tradisi dagang yang diperankan oleh para pedagang lokal dalam kurun waktu yang panjang, yang masih ditemukan hingga penghujung abad ke-20. Pola itu menggambarkan bagaimana jaringan perdagangan orang-orang Bugis terbentuk dengan menyusuri pulau-pulau di wilayah sekitar. Selanjutnya, pulau-pulau yang disinggahi dalam prosesnya menjadi bagian penting bagi terbangunnya relasi dan meluasnya peta perdagangan di wilayah Teluk Bone, hingga terbentuk jaringan yang lebih luas ke pulau-pulau di luar kawasan teluk. (Nur, TT:3)

Jaringan perdagangan yang terbentuk itu cenderung mewakili ciri heterogenitas komoditi dengan munculnya karakteristik masing-masing wilayah. Misalnya dari tanah Bugis, para pedagang mengangkut komoditi utama yakni beras, kopi dan sarung tenun. Sedangkan, komoditi dari Sulawesi Tenggara, diperoleh mutiara, kerang, cangkang penyu, agar-agar, tripang, dan sarang burung. Sementara, dari Sulawesi Utara dan Tengah, para pedagang membawa serbuk emas, kayu cendana, sarang burung dan cangkang penyu. Pedagang dari Kalimantan, mereka membawa keluar serbuk emas, sarang burung, madu tripang dan cangkang penyu. Pedagang Bugis yang akan berlabuh ke Singapura selalu

membawa beras, ketika pulang mereka kadang membawa senjata dan mesiu produksi Amerika dan Inggris. Dari Singapura, mereka juga membawa keluar opium Cina, peralatan dapur Cina dan Siam, sutra mentah Cina, kain katun Bangali, kain wol dari Eropa, seprei, dan besi bekas. Dari Pelabuhan-pelabuhan Jawa, mereka mengangkut keluar gula pasir, tembakau dan benda-benda kuningan. (Nur, TT:3-4) Di pelabuhan Malaka, para saudagar Bugis membeli kain-kain asal Gujarat, Bengal, dan Koromandel, kemenyan dan benzoin dengan jumlah yang banyak. (Meinlink-Roelofs, 2016:125)

Dengan memanfaatkan pelabuhan kecil, dengan kekuatan perahu layar, pedagang lokal mampu menjangkau samudera luas dan melakukan kontak dengan pedagang lintas pulau, yang menjadi bagian penting bagi terbentuk dan menguatnya diaspora Bugis. Perahu layar, berdasarkan periode angin-muson, perahu tradisional mampu menjangkau kepulauan yang terletak di timur, diantaranya Maluku, Timor, Nusa Tenggara, bahkan hingga ke Papua. Sedangkan di belahan barat, pedagang-pedagang Bugis telah terhubung dengan kepulauan Riau dan semenanjung Malaka sejak abad XVI.

Sebagaimana dikemukakan oleh Andaya, bahwa hubungan pedagang Bugis dengan orang-orang Malaka sudah terjalin sejak sebelum abad ke-19. Walaupun identifikasinya masih samar, dengan menggunakan sebutan ‘orang laut’. Walakin, dengan mengamati perilaku, ritual-tradisi, maupun pola hidup menunjukkan adanya pengaruh Bugis yang kuat, misalnya dalam hal memproduksi minyak kelapa dan mengayam daun nipah. Beberapa gelar adat seperti *datu* dan *sullewatang* yang digunakan di Melayu juga menunjukkan pengaruh Bugis. (Andaya, 2019: 219)

Ariwibowo mengutip Sutherland yang mengungkapkan bahwa walaupun Belanda mendominasi jalur perdagangan dan rempah-rempah di kawasan timur Indonesia, namun para pelaut Bugis, Bajo, Sulu, Mindanao, Timor, masih memiliki hubungan perdagangan yang baik dengan para pedagang Tionghoa, Inggris dan Portugis. Para pedagang Tionghoa di kawasan ini bahkan memiliki pos perdagangan di sekitar Maluku, Laut Flores,

<sup>8</sup> Mangapping adalah awak kapal yang juga berprofesi sampingan sebagai pedagang beras

Bali dan Lombok (Sutherland, dalam Ariwibowo, 2016: 199). Hal ini terjadi sebab Belanda hanya memonopoli perdagangan rempah-rempah seperti pala, cengkeh, vanili, dan beberapa lainnya, sementara komoditas kebutuhan dari Tiongkok terdiri dari bulu burung atau hewan, sarang burung walet, teripang, cangkang kura-kura atau penyu, kayu cendana dan gaharu, rotan, dan lainnya yang dianggap tidak memiliki nilai ekonomis bagi Belanda (Sutherland dalam Ariwibowo, 2016: 200).

Orang-orang Bugis yang menyebar ke berbagai penjuru nusantara tidak selalu atau tidak hanya dikenal sebagai pedagang. Pada awal abad ke-19 di Singapura, termasuk Johor, Sambas, Pontianak dan Mempawah (Kalimantan Barat), golongan Bugis selain berdagang dengan perahu, mereka juga menjadi peladang komersil dan *peneroka*.<sup>9</sup> Bahkan, beberapa sumber menyebut bahwa seringkali orang-orang Bugis muncul di perairan sebagai perompak. Mengenai perompak Bugis, Meilink-Roelofs mencatat, “kemunduran skala besar yang dialami oleh pelayaran dagang bangsa Asia menjadi status perdagangan pesisir di Nusantara juga sudah dimulai sejak jauh sebelum 1800, selain juga akibat dari “perompakan” yang dilakukan oleh orang Bugis yang muncul di beberapa titik di kawasan Malaya-Indonesia.”(Meilink-Roelofs, 2016:xxviii)

Gambaran orang Bugis pada masa perdagangan kuno memang masih samar, yang bagi Meilink-Roelofs kadang memerankan pedagang namun pada waktu lain muncul sebagai perompak. (Meilink-Roelofs, 2016: 150) Sementara sumber lain seperti Andaya (2019) dan Lopian (2009) menyebutkan, bahwa aktivitas atau kelompok yang melakukan perompakan di sekitar laut Sulawesi dilakukan oleh orang laut, yang selanjutnya lebih mengarah ke orang-orang Sama atau Bajo. Pada catatan kakinya, Meilink-Roelofs mengkritik inkonsistensi Pires yang membandingkan orang Selat dengan orang Bugis. Menurutnya, Pires belum cukup menjelaskan mengenai perbedaan antara kedua masyarakat pelaut tersebut. (Meilink-Roelofs, 2016:28) “Orang-orang Bugis, yang ditemui Pires di Malaka, adalah

para saudagar yang jujur-setidaknya pada saat itu. Seperti halnya para saudagar Kalimantan, mereka membawa banyak bahan pangan seperti beras dan beberapa emas,” (Meilink-Roelofs, 2016:125).

### **Bugis di Johor abad ke-18: Teman yang tidak disenangi**

Barangkali ada benarnya, bahwa tekanan-konflik dapat mendorong lahirnya inovasi dan terbukanya peluang-peluang baru. Ketika aliansi Bone bersama Belanda menjatuhkan Makassar dan melahirkan perjanjian Bongaya pada 1666, orang-orang Bugis mulai tersingkir dari pelabuhan Makassar. Perang telah memaksa orang-orang mereka untuk mencari penghidupan baru ke negeri yang jauh. Berlayar ke laut jauh, lalu membuka pemukiman, sebagian bahkan ada yang memilih menjadi penyamun, mengadang kapal-kapal, di laut yang tidak bertuan. Bakat dan pengetahuan dan terutama kegigihan mereka membawanya menjelajah perairan jauh ke Filipina, India, hingga Australia untuk belajar. Mereka mungkin bukan yang terbaik, bukan pelaut ulung seperti kata Pelras, tapi pengalaman panjang mendorong mereka tumbuh menjadi pelaut yang tangguh dan disegani. Bahkan, Raffles menyebut mereka sebagai *the Viking of the East*, untuk menggambarkan bagaimana mereka berlayar dan bertarung mempertaruhkan hidup. Perompakan digunakan sebagai alat untuk menguatkan pengaruh menghadirkan persaingan dengan Belanda.

Viking dari Timur mungkin memulai kisahnya ketika menemukan momentum krisis politik yang menimpa kesultanan Johor pada permulaan abad ke-18. Krisis politik Johor berefek terhadap situasi perekonomian yang kacau. Johor butuh dewa penyelamat, orang yang mampu mengangkat Johor dari situasi sulit. Pilihan bangsawan jatuh ke orang-orang Bugis, Viking dari Timur. Dikenal dengan pengalaman di bidang pelayaran, ahli dagang dan kecakapan dalam militer, kombinasi yang lengkap untuk mengatasi kekacauan.

Pengaruh Bugis di Johor mencapai puncaknya pada tahun 1723. Tersebutlah nama Daeng Marewa, tokoh Bugis pedagang timah

<sup>9</sup> Peneroka adalah perintis, pembuka lahan, juga bisa berarti pemukim. Lihat Tajudeen, 2011. ‘Sejarah Kota dan Senibina Masyarakat Pedagang Bugis/Makassar di

Singapura, 1811-1940-an.’ Konvensyen Antarbangsa Diaspora Bugis. Universiti Kebangsaan Singapura. Hal, 48.

yang tampil sebagai dewa penyelamat bagi Johor, setelah menyelamatkannya dari ekspansi Siak, yang dipimpin oleh Raja Kecil putera Raja Pagaruyung. Saat terjadi perebutan pemerintahan antara Raja Sulaiman berhadapan dengan Raja Kecil, orang-orang Bugis tampil sebagai pemecah kebuntuan. Diceritakan bahwa Raja Sulaiman sempat diusir dari istananya dan melarikan diri ke Kampar. Saat itu, peluang orang-orang Bugis merebut pemerintahan terbuka lebar. Namun, Daeng Marewa mengingatkan pendukungnya, bahwa orang-orang Bugis tidak boleh menjadi Sultan. Menurutnya, bagaimanapun situasinya, posisi Bugis hanya boleh berada di balik penguasa. Demikianlah satu-satunya cara bagi orang Bugis agar bertahan di Johor ialah dengan tetap menjaga posisi dan perannya sebagai *king maker*. Peran yang sesungguhnya lebih banyak memberikan banyak keuntungan. Posisi tersebut juga menghindarkan mereka dari pertikaian politik yang memiliki resiko lebih besar di masa-masa mendatang.

Atas jasanya, Daeng Marewa lalu diangkat sebagai Raja Muda, jabatan tertinggi kedua di Johor dengan gelar Yang Dipertuan Muda.<sup>10</sup> Jabatan prestisius itu setingkat di bawah Sultan Johor, namun pada prakteknya, kekuasaannya lebih dari itu. (Daud, 2016) Raja Muda menggambarkan bagaimana keberhasilan Bugis membangun dominasi dan kekuasaannya di tanah Melayu. Pada periode ini, perdagangan di Johor dan negeri Melayu berkembang pesat. (Parani, 2015: 60-61)

Keberhasilan di dunia politik turut mempengaruhi pesatnya pertumbuhan dagang di negeri Melayu. Tetapi, sejarah diaspora Bugis belum usai. Munculnya riak di tengah masyarakat kadang memicu ketegangan antara penduduk lokal dengan kelompok pendatang. Fragmentasi masyarakat yang terbangun berdasarkan sentiment budaya dan bahasa, tidak bisa dihindari. Meski demikian, perbedaan tidak harus selalu dibenturkan. Kelompok Bugis memang minoritas, akan tetapi kekuatan diplomatik serta aliansinya dengan kelompok bajak laut, mutlak dihitung sebagai kekuatan penekan yang efektif. Atas dasar itu, Daeng Marewa bersama Raja Tua

Daeng Manompo mewakili Bugis menginisiasi sebuah perjanjian dengan pihak Johor yang diwakili oleh Sultan Sulaiman, Raja Indera Bungsu dan Bendahara Pahang. Perjanjian bersejarah persahabatan itu menandai sejarah baru Bugis di Melayu sekaligus yang selanjutnya menentukan arah perjalanan diaspora Bugis di negeri Melayu. Perjanjian persahabatan itu mengikat orang-orang Bugis dan orang-orang Melayu di Johor, menerangkan kedua belah pihak akan saling melindungi dan mendukung kepentingan masing-masing, termasuk dicapainya kesepakatan pertukaran tawanan. Ditegaskan pula bahwa untuk urusan politik, Bugis sudah merepresentasikan orang-orang Makassar dan orang-orang Sumbawa yang ada di Johor. Dan siapapun yang melanggar akan dikenakan sanksi. Dalam perjanjian persahabatan itu, juga diterangkan bahwa orang-orang Bugis bebas keluar masuk di Pelabuhan-pelabuhan di Johor. (Parani, 2015: 26-27)

Bagaimana orang-orang Bugis memperoleh posisi prestisius tersebut? Posisi dan kewenangan yang diperoleh orang-orang Bugis di Johor menggambarkan kemampuan mereka dalam melakukan penetrasi politik. Keterlibatan mereka dalam politik berimplikasi langsung terhadap upaya pengembangan jaringan perdagangan mereka. Selanjutnya, orang-orang Bugis di Johor melakukan perkawinan campuran yang membawa ikatan Bugis-Johor berkembang kian kuat. Mereka mendapatkan tempat istimewa dari pemerintah kerajaan Johor tidak hanya karena kemampuan balatentara yang kuat, terlatih dan selalu siap perang, juga berkat kemampuan diplomasi Bugis yang diperankan oleh Raja Muda. Dukungan lainnya yang tidak kalah penting adalah jaringan kekeluargaan di Selangor yang sewaktu-waktu dapat saling menyokong satu sama lain. Namun kekuatan lain yang membawa Bugis begitu disegani adalah aliansi jaringan pelayaran yang kerap melakukan penyergapan di laut. Orang-orang Bugis berteman baik dengan para bajak laut. Karenanya, tidak salah jika muncul kesimpulan bahwa, untuk mematahkan kekuatan orang-orang Bugis, maka terlebih dahulu yang perlu

<sup>10</sup> Raja Muda atau Jawatan Yang Dipertuan Muda menurut penyebutan Malaysia adalah tampak lebih berkuasa daripada sultan, dan hebatnya hanya dipegang oleh suku Bugis. Lihat Alwi Daud, 2016. Peranan Opu Bugis Lima

Bersaudara di Johor: Kajian berdasarkan teks silsilah Melayu dan Bugis, Hikayat Opu Daeng Menabung dan Hikayat Negeri Johor. Makalah, Universitas Malaya.

dikalahkan adalah kekuatan jaringan pelayaran maritim mereka. (Parani, 2015:27)

Keberhasilan mengatasi krisis kerajaan diganjar dengan jabatan Raja Muda. Tentu tidak berlebihan mengingat apa yang telah dilakukannya untuk Johor. Namun yang lebih penting adalah kelompok Bugis yang terafiliasi dengan aliansi kelompok bajak laut adalah nilai tawar yang tidak mungkin bisa ditolak. Yang perlu dicatat bahwa, mereka datang tidak untuk menaklukkan, seperti kedatangan Belanda, Portugis dan Spanyol ke Asia Tenggara. Kelompok Bugis yang mendamaikan Johor pun tidak terikat dengan penguasa di salah satu kerajaan Bugis dari Sulawesi. Menjadi Raja Muda di Johor, menguasai Selangor, Mempawa dan Sambas tanpa menghilangkan ciri kedaerahan masing-masing. Mereka sama sekali tidak mengakuisisi pemerintahan menjadi kerajaan Bugis. (Parani, 2015: 60)

Penerus Daeng Marewa sebagai pemimpin Bugis di Johor adalah Daeng Pali. Raja Muda ini juga melanjutkan tradisi sebelumnya yakni perkawinan silang dengan orang Melayu. Meski banyak yang bangsawan Melayu yang menentang, mereka selalu berhadapan dengan fakta bahwa Bugis memiliki kekuatan yang tidak bisa mereka tentang. Daeng Pali juga mendeklarasikan ulang perjanjiannya dengan Johor. Pada periodenya, di samping tetap fokus pada timah, ia memperkenalkan tanaman gambir, hasil bumi yang selanjutnya turut meramaikan aktivitas perdagangan, saat itu, gambir menjadi komoditi andalan di Riau. (Parani, 2015: 34)

Raja Muda berikutnya adalah Daeng Kemboja. Raja Muda kali ini akan menghadapi tantangan dari dalam istana juga dari luar oleh upaya Belanda untuk menguasai timah. Ketika terjadi konflik antara Raja Melayu dengan Raja Johor terkait penguasaan Siak, situasi itu dimanfaatkan Belanda untuk masuk dan menawarkan bantuan kepada Raja Melayu, dengan syarat Belanda mendirikan banteng di Pulau Gontong yang terletak di muara sungai Siak. Akan tetapi, Belanda meminta lebih untuk hak monopoli dagang di Siak, juga penguasaan komoditi timah di Klang dan Linggi di Slangor. Penawaran Belanda terlalu tinggi. Apalagi dengan politik adu domba yang dilakukan Belanda membuat petinggi kesultanan Johor lebih memilih orang-orang Bugis, yang punya riwayat menyelamatkan Johor dari konflik

internal. Saat itu, hanya dukungan kekuatan Bugis yang mampu mengimbangi Belanda di Malaka. Beberapa kelompok bangsawan Johor sebenarnya tidak suka dengan orang-orang Bugis. Meski telah dilakukan perkawinan campuran, di antara mereka masih menganggap Bugis sebagai orang luar. Walakin, orang-orang Bugis terlalu kuat untuk disingkirkan. Bagi sebagian petinggi Johor, mungkin orang Bugis adalah teman yang sebenarnya tidak disenangi tetap harus diajak berteman. (Parani, 2015)

Memang harus diakui bahwa orang Bugis itu tidak disenangi karena mereka merupakan golongan minoritas yang Makmur di Johor. Tetapi tidak dapat dielakkan bahwa ada beberapa pembesar yang menghendaki orang Bugis kembali berkuasa karena faktor perdagangan di Johor. (Parani, 2015: 54)

Ketika Daeng Kemboja meninggal pada tahun 1777 sebagai penguasa tertinggi di Johor, tahtanya diwarisi oleh Raja Haji berkat kemampuan diplomasi dan dukungan bangsawan. Tahun 1778, Raja Haji menjadi Yang Dipertuan Muda Johor dan menjadi penguasa daratan dan perairan Johor-Pahang-Riau. Raja Haji meninggal pada 1784 dalam peperangannya melawan Belanda pimpinan van Braam. Ia kemudian digantikan oleh Raja Ali. Belanda berusaha memecah pemerintahan Johor dan Melayu dengan menerapkan politik *divide et impera*, namun hasutannya tidak berhasil. Belanda rupanya tidak mampu menahan diri untuk segera menguasai Johor. Pada 28 Oktober 1784, Belanda menawarkan perjanjian yang tampaknya mustahil untuk diterima. Isi perjanjian yang sebenarnya lebih bermakna pernyataan perang tersebut adalah: kontrak antara Bugis dengan Melayu diputuskan; orang Bugis dilarang menjadi Raja Muda Johor; Kapal-kapal Belanda akan ditempatkan di Penyengat untuk mengawasi kapal-kapal musuh. Peperangan tidak terhindarkan. Namun karena armada kekuatan tempur Belanda jauh lebih besar, tanggal empat hari berselang, Belanda memenangkan peperangan. Sultan Mahmud, Raja Tuah, Raja Temenggung, dan Raja Bendahara menandatangani perjanjian bagi penempatan pasukan Belanda di Riau. Perjanjian tersebut

juga memberi hak kepada Belanda sebagai pelindung dari kerajaan Johor-Pahang-Riau. Pelantikan seorang sultan baru harus mendapatkan persetujuan Belanda. (Parani, 2015)

Kalah perang memaksa Raja Ali menyingkir ke pengasingan di Meimpawa, Kalimantan Barat. Di pengasingan, ia tetap memelihara semangat untuk kembali merebut kekuasaannya. Ia mengumpulkan para pelaut ilanun dan merompak kapal-kapal Belanda. Pengikut Raja Ali bersama kelompok ilanun terus meneror pos-pos Belanda. Ketika Raja Ali ke Penyengat pada 1800, Sebagian orang-orang Melayu belum pulih dengan rasa tidak suka kepada orang-orang Bugis. Namun, orang-orang Bugis bagaimanapun selalu menjadi sekutu yang lebih baik dibanding Belanda. Akhirnya, perjanjian persahabatan Bugis-Melayu pada 1721 lalu, kembali diikrarkan ulang pada tanggal 21 Desember 1804. Ia memperoleh kembali kedudukannya sebagai orang kedua setelah sultan. Meskipun tidak sekuat sebelumnya, setelah mengalami kekalahan dari Belanda. Orang-orang Bugis yang berangkat ke Riau sejak perang, memilih tidak kembali. (Parani, 2015: 57)

Orang-orang Bugis berhasil mencapai puncak kejayaannya di semenanjung Melayu pada abad ke-18 berkat kemampuannya menjadi salah satu kelompok yang turut berkontribusi dalam peta perdagangan nusantara hingga ke tingkat regional Asia Tenggara. Kemampuan mereka dalam berdiplomasi menghadirkan ironi bagi Sebagian orang Melayu, yang meski hanya pendatang, namun mampu menjadi penengah konflik di kesultanan Johor. Dari jaringan tradisional itu pula mereka membangun aliansi termasuk dengan kelompok-kelompok lanun yang kerap melakukan pengadangan kapal di laut.

Lembaran baru sejarah abad ke-19 dibuka dengan kehadiran Singapura sebagai kota komersil yang sedang membangun kejayaannya. Pada tahun 1819 banyak pedagang Bugis di Riau yang bermigrasi dan pindah ke Singapura. Kota Singapura perlahan berkembang menjadi surga bagi para pedagang.

## **E. Kesimpulan**

Persebaran dan penguatan jaringan diaspora Bugis menjadi bagian penting bagi tumbuh dan perkembangannya perdagangan di nusantara, semenanjung Melayu, hingga ke level Asia Tenggara, setidaknya sejak abad ke-18 hingga abad ke-20.

Mode diaspora Bugis didorong oleh kebutuhan mencari penghidupan baru di samping karena terdampak konflik, sekitar abad ke-18. Persebarannya kemudian dikuatkan oleh jaringan tradisional yang telah terbentuk dalam rentang abad pada kantong-katong pemukiman di sekitar dermaga-dermaga yang menyebar di penjuru nusantara hingga ke negeri Melayu. Jaringan tradisional yang membentang dari gerbang Teluk Bone ke arah Timur, Sulawesi Tenggara, Buton, Kepulauan Ambon, Timor, hingga Papua. Ke arah Barat, mereka mengunjungi Pelabuhan Jawa, di antaranya Gresik, lalu berdiaspora ke Bontan, Kalimantan, di Sumatera terutama di kepulauan Riau dan semenanjung Malaka.

Dalam rentang abad mereka berasimilasi dengan penduduk lokal, melalui perkawinan silang juga dengan perjanjian persahabatan yang digagas bersama orang-orang Melayu-Johor. Kecakapan berdiplomasi dan membangun aliansi sebenarnya telah menjadi modal dasar dalam aktivitas perniagaan. Bagaimana mereka berinteraksi dengan pasar, menghubungkan jaringan perdagangan, dan lalu membentuk aliansi yang kuat, telah membawa Bugis pada posisi yang diperhitungkan di wilayah-wilayah yang jauh dari tanah asal. Dalam wacana kontemporer, orang-orang Bugis tetap memelihara dan menguatkan jaringan dalam wadah Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) dalam ikatan persaudaraan yang tersebar di setiap provinsi atau wilayah tempat mereka berdiaspora. Dalam bentuk lain namun dalam spirit yang sama, secara berkala mereka menyelenggarakan Pertemuan Saudagar Bugis Makassar (PSBM), semacam ajang reuni para tokoh, sekaligus menjajaki kemungkinan proyek bisnis atau alih-generasi.

Paper singkat ini mungkin dapat berkontribusi bagi upaya untuk memahami model persebaran penduduk migran Bugis di berbagai penjuru nusantara, juga dan terutama di wilayah-wilayah yang rentan. Dalam konteks Indonesia yang memiliki identitas kultural yang heterogen, mobilitas penduduk dan persilangan

budaya cepat atau lambat tidak mungkin bisa dihindari. Asimilasi maupun akulturasi, toh pada kasus dan situasi tertentu terbukti mendatangkan kebaikan lebih banyak dibanding kerugian antara pihak-pihak pendatang maupun warga lokal.

Apa yang tidak diharapkan dalam proses persebaran ini adalah terjadinya peminggiran - atau eksploitasi, bahkan perbudakan terhadap warga lokal, yang banyak terjadi di abad masa kolonial.<sup>11</sup> Diaspora tentu saja tidak dapat dilihat sebagai upaya terstruktur dari kelompok tertentu yang memiliki agenda ekspansi, seperti yang terjadi di abad-abad sebelumnya. Konflik yang bernuansa rasial yang terjadi di Ambon, Papua Barat, Timor, maupun di Sulawesi Tengah yang melibatkan warga pendatang tidak harus mengadili diaspora yang telah dirintis oleh leluhur Bugis di tanah Melayu, Riau, Kalimantan dan Sulawesi Tenggara. Di era digital kini, pemerintah memiliki mekanisme pendataan yang efektif untuk melakukan deteksi dini terjadinya pergerakan-persebaran warga yang 'ilegal'.

Hal penting lainnya adalah keanekaragaman kultural yang dimiliki Indonesia, bagaimana pun adalah sebuah bangunan indah yang barangkali tidak akan ditemukan di negara mana pun di dunia. Menjadi tugas bagi generasi hari ini untuk menjaga interaksi lintas kelompok (suku dan agama) sambil tetap menjaga harmoni. Gagasan literasi budaya lintas etnis dan intra-antar-agama perlu didorong untuk meneruskan cita-cita luhur Indonesia yang melindungi segenap bangsa serta mewujudkan kesejahteraan bersama. Sebab, apa artinya Indonesia, jika dan ketika kelompok-kelompok suku dan subsuku tidak bisa hidup berdampingan dengan damai dan saling menguatkan?

## F. Saran (diskursus)

Diaspora Bugis di berbagai penjuru nusantara telah menjadi bagian dari perjalanan panjang periode sejarah bangsa ini, juga bagi negeri Jiran. Menanggapi ironi diaspora yang disinggung Ammarell, ada baiknya kita menyimak kalimat Gustina (2020) berikut:

Terlepas dari permasalahan tersebut, diaspora Bugis Makassar juga selalu terwakilkan dalam pemerintahan Malaysia

bahkan sudah dua kali perdana menteri Malaysia adalah keturunan Bugis. Yakni Tun Abdul Razak dan Najib Razak. Tun Abdul Razak adalah perdana menteri Malaysia yang kedua (1970-1975) merasa bersyukur karena telah mewarisi kepemimpinan Bugis Makassar dengan semangat kepahlawanan untuk memantapkan kekuatan dan perpaduan rumpun Melayu. (Gustina, 2020: 2-3)

Hubungan pendatang dengan penduduk lokal tentu tidak selalu berjalan mulus. Walakin, apa yang dipaparkan oleh Ammarell (2002) mengenai tersisihnya penduduk lokal karena arus migran dan penetrasi Bugis, tetap menjadi wacana dan menjadi perhatian kajian-kajian relevan, tidak hanya bagi para akademisi (sejawaran, antropolog maupun sosiolog) yang fokus mengkaji diaspora Bugis, lebih jauh, persoalan yang timbul dari migrasi atau mobilitas penduduk atau diaspora ini, tetap membutuhkan perhatian serius dari pemerintah.

Persoalan serius yang sering muncul di permukaan dan lalu memantik konflik antar kelompok (motif etnis maupun agama) lebih sering dipicu oleh lemahnya definisi perbatasan yang tentu saja merupakan dampak turunan dari lemahnya regulasi terkait tanah dan penguasaan, juga tentang eksistensi kelompok lokal (atau kelompok adat). Apa yang dipahami sebagai perbatasan tidak selalu sama bagi tiap kelompok etnis yang ada, atau lebih sering lahir sebagai bentuk penguasaan atau dianggap sebagai 'hadiah bagi pejuang penyintas', yang dalam perspektif Bugis dikenal dengan istilah *massappa dalle* (mencari rejeki), lekat dengan predikat aspek religious menjalankan misi hidup.

Sayangnya, regulasi yang mengatur tentang masyarakat adat, hingga saat ini masih sebatas rancangan, dan ironisnya masih terus menuai polemik. Padahal, rancangan ini telah dinisiasi pembahasannya sejak 2009 oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). Setelah lebih dua dekade terkatung-katung, AMAN menyangsikan hukum ini mendapat perhatian serius di ruang-ruang rapat anggota legislatif. Apalagi menurut Rukka, ketua AMAN, rancangan yang ada belum mengakomodir perlindungan terhadap perempuan dan posisi pemuda adat.

Undang-undang kelompok adat secara

<sup>11</sup> Hingga awal abad ke-20, jual beli budak masih marak, termasuk yang didatangkan dari pedalaman Pomalaa,

Kolaka, dalam laporan Paul dan Sarasin (1905) dalam Melamba (2012: 163-166)

konferensi diharapkan mewakili kepentingan kelompok lokal, memang masih perlu dilakukan kajian mendalam dan dari perspektif multidisiplin. Dalam wacana kiwari, praktek demokrasi dalam Pemilu legislatif dan Pemilu pada beberapa kasus boleh jadi tidak relevan untuk diaplikasikan pada tingkat desa (Pilkades). Warga desa tidak harus terpolarisasi ke dalam fragmentasi kelompok-kelompok politik tertentu hanya untuk menentukan siapa yang akan memimpin di desanya. Warga desa seharusnya tidak perlu terlibat dalam ketegangan-ketegangan skala horizontal bahkan menyentuh internal keluarga yang dipicu oleh perbedaan pilihan. Politik di desa, terkadang justru menjadi gangguan bukan hanya terhadap jalannya pemerintahan akan tetapi juga berdampak pada harmoni dan keselarasan yang sangat dibutuhkan dalam tata kehidupan masyarakat.

Memang, regulasi tidak boleh dirumuskan secara terburu-buru. Apa yang kita saksikan hari ini sebagai persoalan, akar-akarnya masih perlu diurai lebih detail, jernih dan senantiasa perlu memperhatikan aspek diakronis dan sinkronis-nya. Karena, jika diaspora yang sukses mengantar orang-orang Bugis meraih posisi penting di Johor pada abad ke-18 dan lalu mendapatkan kekuasaan sebagai buah dari keberhasilan mereka meredakan konflik internal kerajaan, seperti halnya Tun Abdul Razak dan Najib Razak yang didaulat sebagai Perdana Menteri tahun 1970-an di Malaysia, tidak bisa serta merta dicap sebagai kesalahan sejarah, hanya karena di abad ini, di daerah Timor Timur, Ambon, Sulawesi Tengah dan Papua Barat (seperti yang diurai oleh Ammarell, 2002) mereka gagal.

## G. Daftar Pustaka

- Amin, Kasma F. (2016). *Hikayat Bugis (dalam sastra Sejarah)*. Yogyakarta: Pustaka AQ Publishing House.
- Ammarell Gene (2002). 'Bugis Migration and Modes of Adaptation to Local Situation.' *Ethnology*. Vol 41, No 1. Winter, 2002, 51-67
- Andaya, Leonard Y. 2019. *Selat Malaka: Sejarah Perdagangan dan Etnisitas*. Depok: Komunitas Bambu.
- Ariwibowo, Gregorius Andika. 2016. 'Book review'; *Commodities, Ports, and Asian Maritime Trade since 1750*. *Lembaran Sejarah*, Vol. 12 Nomor 2. 198-202
- Asba, A. Rasyid. 2007. *Kopra Makassar, Perebutan Pusat dan Daerah: Kajian Sejarah Ekonomi Politik Regional di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Bakti, Andi Faisal (ed.), dkk. (2010). *Diaspora Bugis di Alam Melayu Nusantara*. Makassar: Inninawa.
- Burhanuddin Safri, dkk. 2003. *Sejarah Maritim Indonesia: Menelusuri Jiwa Bahari Bangsa Indonesia Dalam Proses Integrasi Bangsa (Sejak jaman prasejarah hingga abad XVII)*. Pusat Kajian Sejarah dan Budaya Maritim Asia Tenggara Lembaga Penelitian Universitas Diponegoro Semarang bekerjasama dengan Pusat Riset Wilayah Laut Dan Sumber Daya Non Hayati Badan Riset Kelautan Perikanan (BRKP) Departemen Kelautan dan Perikanan.
- Daud, Alwi (2016). 'Peranan Opu Bugis Lima Bersaudara di Johor: Kajian berdasarkan teks silsilah Melayu dan Bugis, Hikayat Opu Daeng Menabung dan Hikayat Negeri Johor.' Makalah, Universitas Malaya.
- Gustina dan Muhammad Rizky Prawira. (2020). 'Pengaruh Diaspora Bugis Makassar di Malaysia terhadap Hubungan Bilateral Indonesia-Malaysia.' *Lino, Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*. Vol 1 No 1, Mei-Oktober 2020.
- Hamid, Abd. Rahman. (2008). *Qahhar Mudzakkar di Persimpangan Jalan*. Makassar: Pustaka Refleksi.
- Husein, Sarkawi B. (2011). "Selama Laut Masih Berombak, Pasir di Pantai Tak Akan Tenang": Diaspora Orang-orang Bugis-Makassar di Surabaya, Abad XV-XX.' *Jurnal IKAHMSI*, edisi I, nomor 2, Juli-Desember 2011.

- Jamaluddin. (2018). Tradisi dan Modal Kultural Etnis Bugis di Riau dan Jambi. Kontekstualita, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan. Vol 33, Nomor 2, Desember 2018. (127-142)
- Kaunang, Ivan R.B., Haliadi, dan La Ode Rabani. 2016. *Jaringan Maritim Indonesia: Sejarah Toponim Kota Pantai di Sulawesi*. Jakarta: Direktorat Sejarah, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- Khusyairi, Johny Alfian, dkk.(2017). *Berlayar ke Pulau Dewata; Diaspora Orang-orang Bugis-Makassar dan Mandar di Pulau Bali*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Kooreman, P.J. 2019. *Fakta dan Peristiwa di Wilayah Sulawesi dan Daerah Bawahannya*. Penerjemah Margriet M. Lappia. Unhas Press bekerjasama dengan Balai Pelestarian Nilai Budaya Sulawesi Selatan.
- Lapian, A.B. 2009. *Orang Laut, Bajak Laut, Raja Laut: Sejarah Kawasan Laut Sulawesi Abad XIX*. Depok: Penerbit Komunitas Bambu
- Lombard, Denys. (2005). *Nusa Jawa: Silang Budaya, Kajian Sejarah Terpadu. Bagian II: Jaringan Asia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Forum Jakarta-Paris, Ecole française d'Extreme-Orient.
- Mattulada. 1995. *Suatu Lukisan Analisis Antropologi Politik Orang Bugis*. Hasanuddin University Press, Makassar.
- Meilink-Roelofs, M.A.P. 2016. *Perdagangan Asia dan Pengaruh Eropa di Nusantara Antara 1500 dan Sekitar 1630*. Jogjakarta: Penerbit Ombak.
- Melamba, Basri. (2012). *Peradaban Mekongga Kolaka: Sejarah Sosial, Politik, dan Ekonomi*. Kolaka: PD Aneka Usaha Kolaka bekerjasama dengan Penerbit Rona Pancaran Ilmu.
- Nur Nahdia. TT. 'Pola Perdagangan Orang Bugis di Sulawesi ke Pusat Perdagangan 1900-1930-an.' Makalah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Parani, Julianti L. (2015). *Perantauan Orang Bugis Abad ke-18*. Penerbitan Naskah Sumber Arsip, Arsip Nasional Republik Indonesia.
- Purba Juniar, Sri Murlianti, dan Martinus Nanang. (2017). *Masyarakat Bugis Diaspora di Bontang Abad XX*. Yogyakarta: Kepel Press.
- Rabani La Ode, Bambang Purwanto dan Sri Margana. (2020). 'Politik dan Ekonomi di Dua Kota: Baubau dan Kendari pada tahun 1950-an-1960-an.' Mozaik Humaniora, Vol 20 (1) : 39-56
- Riadi Slamet. 2019. 'Latoa: Antropologi Politik Orang Bugis Karya Mattulada, "Sebuah Tafsir Epistemologis."' Pangadereng, Vol 5 Nomor 1, Juni 2019.
- Sani, Amilda. (2020). 'Diaspora Bugis dan Perkembangan Perdagangan Kopra di Sumatera pada Awal Abad XX.' Tamaddun: Jurnal Kebudayaan dan Sastra Islam, Vol. 20 No.1, 2020
- Suryanti, Ihzan, Mz, St. Rahmah. (2021). Sejarah Diaspora Suku Bugis-Makassar di Kalimantan Tengah. Rihlah, Jurnal Sejarah dan Kebudayaan, Vol 8, Nomor 2 ,Juli-Desember 2020, 100-112
- Sutherland, Heather. (2021). *Seaways and Gatekeepers Trade and State in the Eastern Archipelagos of Southeast Asia, c.1600–c.1906*. NUS Press National University of Singapore.
- Tajudeen, Imran bin. 2011. 'Sejarah Kota dan Senibina Masyarakat Pedagang Bugis/Makassar di Singapura, 1811-1940-an.' Konvensyen Antarbangsa Diaspora Bugis. Universiti Kebangsaan Singapura.

Daftar informan

Haji Amile, (Lonrae, Bone, 79 tahun),  
wawancara tanggal 10 Februari 2023.

Haji Beddu (Bajoe, Bone, 77 tahun),  
wawancara tanggal 15 Januari 2023, 28  
Januari 2023

Haji Madong (Lonrae, 80 tahun), wawancara  
tanggal 9 Pebruari 2023

Sahaka (Lonrae, 77 tahun) tanggal 8 Pebruari  
2023

Takiyuddin (Bambaea, Bombana, 41 tahun),  
wawancara tanggal 26 Januari 2023